



THAQĀFIYYĀT: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam

ISSN (Print): 1411-5727, ISSN (Online): 2550-0937

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/index>

Vol 22, No. 2 (2023)

Research Article

K.H. A. Warson Munawwir Yogyakarta: Studi Kontribusinya Dalam Bidang Politik Tahun 1973-2009 M

Mimin Ayu Trisnawati*

Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Indonesia

ayutrisnamimin@gmail.com

Musa

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

musaarsyad@uin-suka.ac.id

Syamsul Arifin

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

syamsul.arifin@uin-suka.ac.id

Submitted: January 30, 2023; Reviewed: July 21, 2023; Accepted: November 2, 2023

***Corresponding Author**

Abstract: The research aims to elaborate on the contributions of K.H. A. Warson Munawwir to Indonesian politics from 1973 to 2009, highlighting his significant influence. The study employs a historical method, gathering data through interviews, literature reviews, and observations. A biographical and political approach, along with behavioral theory by Robert F. Berkhofer, Jr., serves as the theoretical framework. The results of this research demonstrate that K.H. A. Warson Munawwir played a pivotal role in instilling values that continue to shape Indonesian politics, particularly in Yogyakarta. Serving as a member of the DPRD in Yogyakarta from 1977 to 1982, he infused an Islamic perspective into Yogyakarta's political landscape. Later, as the head of the PKB political party, he consistently prioritized the ethos of deliberation and helped bridge internal party disagreements. K.H. A. Warson Munawwir was also instrumental in founding PKNU, where he served as chairman of the Shura council. In this role, he worked to ensure that PKNU's vision and mission were genuinely realized. K.H. A. Warson Munawwir is recognized as a kiai, skilled in addressing both religious and political challenges.

Keywords: K.H. A. Warson Munawwir; political contribution; PKB; Yogyakarta DPRD; PKNU

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kontribusi K.H. A. Warson Munawwir dalam bidang politik pada tahun 1973-2009 M. K.H. A. Warson memberikan cukup banyak kontribusi bagi perpolitikan yang ada di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan memanfaatkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan observasi. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan biografi dan politik serta teori behavioral yang dikemukakan oleh Robert F. Berkhofer, Jr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa K.H. A. Warson berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam perpolitikan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Ketika menjabat menjadi anggota DPRD DIY periode 1977-1982, K.H. A. Warson memberikan nuansa islami di pemerintahan Provinsi Yogyakarta. Saat menjadi Ketua Dewan Syura PKB, K.H. Warson selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan umat. Ia juga mampu menjembatani apabila ada perbedaan pendapat dalam partai. K.H. Warson juga berperan besar dalam menghantar berdiri dan tegaknya PKNU. Sebagai Ketua Dewan Syura PKNU, K.H. Warson berusaha agar visi dan misi pendirian PKNU benar-benar direalisasikan. A. Warson adalah seorang kiai yang mumpuni dalam masalah keagamaan dan handal dalam perpolitikan.

Kata Kunci: K.H. A. Warson Munawwir; kontribusi politik; PKB; DPRD Yogyakarta; PKNU

PENDAHULUAN

Islam di Indonesia berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Islam telah mempunyai peranan dalam menjaga, melestarikan, dan bahkan menciptakan simbol-simbol untuk memperkokoh jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Islam menjadi pondasi kekuatan dalam melawan dominasi tiranis penjajahan kolonial Belanda.¹ Ketika menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada masa pendudukan Jepang, aktivitas perjuangan umat Islam semakin tampak, terutama kegiatan-kegiatan militer. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kontribusi dan perjuangan yang besar itu, umat Islam Indonesia berharap bahwa dengan adanya perubahan politik akan dibarengi dan diikuti juga oleh perubahan yang positif pada kedudukan dan posisi umat Islam dalam struktur pemerintahan.

Pada tahun 1960, kebijakan pemerintah justru terkesan meminggirkan Islam, misalnya dengan melarang Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).² Partai yang menjadi kebanggaan Umat Islam saat itu, Masyumi, dibubarkan oleh Soekarno. Tokoh-tokoh Masyumi dicurigai dan dituduh mempunyai keterlibatan dalam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).³ Pada masa Orde Baru (Orba) keinginan sebagian eks elit

¹ Mukhamad Shokheh, *Dari konfrontasi menuju akomodasi: relasi Islam-negara di Indonesia masa Orde Baru, 1966-1998* (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2008), hlm. 1.

² Shokheh, hlm. 2.

³ Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) merupakan sebuah gerakan militer di Indonesia yang dideklarasikan oleh Letkol Sumual pada 2 Maret 1957. Latar belakang munculnya gerakan ini adalah ditiutkannya Divisi Banteng sehingga hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini kemudian diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Hal ini menimbulkan kekecewaan para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan adanya ketidakpuasan dari beberapa daerah di wilayah Sumatera dan Sulawesi

Masyumi untuk merehabilitasi partai juga ditolak oleh pemerintah.⁴ Kebijakan pemerintah Orde Baru mengakui pentingnya nilai-nilai keagamaan dan moral, akan tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang mengarahkan pemikiran-pemikiran keagamaan (misalnya organisasi keagamaan harus berazaskan Pancasila), sehingga terhindar dari terbentuknya politik keagamaan. Pemerintah Orde Baru dalam membuat kebijakan pembangunan bersikap ambivalen dalam memosisikan agama dan politik.⁵ Presiden Soeharto pada masa itu bertindak keras dan berbuat represif terhadap setiap gerakan politik yang berbau dan dilatarbelakangi oleh gagasan-gagasan dan ide-ide keagamaan.⁶

Hal ini membuat kiai-kiai mengambil sikap untuk melibatkan diri dalam dunia perpolitikan, terutama politik praktis. Mereka berusaha untuk memperjuangkan hak dan kewajiban umat Islam. Dengan terjun dalam politik praktis para kiai akan dapat dengan mudah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kiai mempunyai sumbangan yang sangat berarti dalam perubahan sosial. Kiai adalah agen perubahan sosial dengan berbagai macam kreasi dan inovasi yang dimilikinya. Kiai memberikan berbagai tawaran sebagai agenda untuk melakukan perubahan yang cocok dengan kebutuhan riil masyarakat yang dipimpinya.⁷ Sebagai contoh ketika politik Islam terpinggirkan di masa orde baru maka banyak kiai bergerak untuk menegakkan Islam Ahlu as-Sunnah Wa Al-Jama'ah. Adapun salah satu caranya adalah para kiai tersebut terjun ke dalam politik praktis.

Salah satu kiai yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah K.H.A. Warson Munawwir. Pentingnya K.H.A. Warson Munawwir ini untuk diteliti karena ia adalah salah satu sosok kiai yang unik, di satu sisi merasa kecewa kepada pemerintah orde baru karena politik Islam dipinggirkan, sedangkan pada sisi yang lain, ingin terjun ke politik praktis agar tidak mengambil jarak dengan pemerintah. Dengan terjun ke politik praktis, maka nilai-nilai keislaman bisa diperjuangkan. Alasan lain K.H.A Warson penting untuk diteliti adalah karena masih sangat jarang penelitian yang fokus membahas tokoh tersebut. Di antara penelitian yang sudah ada hanya membahas kontribusi K.H.A. Warson Munawwir berfokus pada kontribusinya di bidang pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir. Diantaranya Mustolehudin dan Muawanah, S (2018) dan Nisa (2015a).⁸ Sementara itu, tulisan ini lebih fokus pada kiprah K.H.A Warson Munawwir di bidang politik praktis yang belum pernah dibahas secara lebih spesifik pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya.

Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode historis dengan memanfaatkan data yang didapat dari wawancara, studi pustaka, dan observasi. Adapun pendekatan yang

terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan pemerintah pusat. Pada 2 Maret 1957, Letkol Sumual menyatakan seluruh wilayah Teritorium VII dalam keadaan darurat perang serta berlakunya pemerintahan militer sesuai pasal 129 UUD Sementara dan PP No. 33 tahun 1948 RI. Lihat R. Z. Leirissa, *PRRI, Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta Pusat: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm 69-85.

⁴ R. Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 56.

⁵ Shokheh, *Dari konfrontasi menuju akomodasi*, hlm. 6.

⁶ Dr Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 162.

⁷ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan perubahan sosial*, trans. Abdurrahman Wahid (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987), hlm. xvii.

⁸ Mustolehudin Mustolehudin and Siti Muawanah, "Pemikiran Pendidikan K. H. Ali Maksum Kranyak Yogyakarta," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 16, no. 1 (April 30, 2018).

digunakan adalah pendekatan biografi dan pendekatan politik, sedangkan teori yang dipakai adalah teori behavioral yang dikemukakan oleh Robert F. Berkhofen, Jr.

Berdasarkan paparan tersebut, maka perlu dijelaskan sekilas perjalanan politik K.H.A. Warson Munawwir dari tahun 1973 hingga 2009. Pada tahun 1973 K.H. A. Warson Munawwir⁹ untuk pertama kalinya terjun dalam politik praktis dengan bergabung di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah bergabung di PPP, K.H. A. Warson berhasil memperoleh jabatan sebagai anggota DPRD DI Yogyakarta periode 1977-1982. K.H.A. Warson juga menjadi salah satu kiai yang banyak berperan dalam pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DI Yogyakarta pada tahun 1999. Setelah PKB terbentuk K.H. A. Warson terpilih untuk memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Syura.¹⁰ Pada tahun 2006 atas kesepakatan kiai yang tergabung dalam tim 17 dibentuklah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). K.H. A. Warson merupakan salah satu kiai yang memprakarsai berdirinya PKNU. K.H.A. Warson termasuk dalam tim 17 yang memiliki banyak peran dalam pendirian partai ini.¹¹

Keterkaitan antara kiai dan politik senantiasa menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Banyak perdebatan tentang keterlibatan kiai dalam politik.¹² Sejak tahun 1973-2009 K.H.A. Warson aktif dalam dunia politik. Dia melakukan afiliasi yang berbeda terhadap tiga partai politik yaitu PPP, PKB, dan PKNU. Hal ini menarik untuk diteliti secara mendalam mengingat K.H. Warson merupakan tokoh yang berpengaruh dalam perpolitikan di Yogyakarta.

TEMUAN DAN DISKUSI

Profil K.H.A Warson Munawwir

K.H.A. Warson Munawwir lahir dari keluarga besar Munawwir yang terkenal di kalangan pesantren. K.H. Warson Munawwir dilahirkan 30 November 1934 dari istri kedua K.H. Muhammad Munawwir yaitu Nyai Hj. Sukis. K.H. Muhammad Munawwir, seorang ulama yang mendirikan Pondok Krapyak pada 15 November 1910 dan fasih dalam qira'ah sab'ah (tujuh varian bacaan al-Qur'an). Pada tahun 1942, K.H. Muhammad Munawwir wafat¹³ Setelah K.H. Munawwir wafat, Warson tumbuh dewasa di bawah asuhan K.H. Ali Maksum¹⁴ (kakak iparnya) yang juga merupakan guru tunggalnya.

K.H. A. Warson tidak pernah belajar di pondok manapun kecuali di Krapyak. Hal ini karena K.H. Warson selalu diminta untuk langsung mengajar saat berniat menimba ilmu di

⁹ Untuk selanjutnya K.H. A. Warson Munawwir akan ditulis K.H. Warson

¹⁰ Khalimatu Nisa and Fahma Amirotulhaq, *Jejak Sang Pionir Kamus Al Munawwir K.H.A. Warson Munawwir* (Yogyakarta: PUSTAKA KOMLPEK Q, 2015), hlm. 68, [//lib.unwahas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D36488](http://lib.unwahas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D36488).

¹¹ Ridwan Nasih, Wawancara dengan Nasih Ridwan di kantor Adzikra Tour and Travel, Kotabaru, Komunikasi Pribadi, February 11, 2019.

¹² Imam Suprayogo, *Kyai Dan Politik : Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 8.

¹³ Nisa and Amirotulhaq, *Jejak Sang Pionir Kamus Al Munawwir K.H.A. Warson Munawwir*, hlm. 9.

¹⁴ K.H. Ali Maksum merupakan putra sulung K.H. Ma'shum, Soditan, Lasem. K.H. Maksum ayah K.H. Ali merupakan seorang alim dan kiai yang menjadi rujukan bagi masyarakat dan kiai lain di wilayah Lasem dan Rembang. Ali Maksum menjadi tokoh yang berperan penting bagi perkembangan Pondok Krapyak pasca wafatnya K.H. Munawwir. Lihat juga A. Athoillah, *K.H. Ali Maksum, Ulama, Pesantren, Dan NU*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm. 100.

luar Pondok Krapyak.¹⁵ K.H. Warson berhasil menghafal kitab *Alfiyah* di usia sebelas tahun dan mengajarkannya pada santri Pondok Krapyak yang umurnya lebih tua darinya.¹⁶ K.H. Warson menghabiskan waktu mudanya untuk menulis kamus *Al-Munawwir* pada tahun 1957 dan berhasil diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1973.¹⁷

K.H. Warson juga disibukkan dengan kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), Generasi Muda Islam (Gemuis), dan pemimpin redaksi di harian *Duta Masyarakat*.¹⁸ K.H. Warson telah konsisten berjuang dalam komunitas NU sejak muda. Dimulai dengan keterlibatannya dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di usia dua puluhan.¹⁹ Pada tahun 1958, K.H. Warson terpilih sebagai Ketua Umum GP Ansor untuk wilayah Yogyakarta dan sebagai sekretaris H. Iskandar. Sebagai ketua, K.H. Warson selalu membina anggotanya untuk membangun hubungan baik dengan ormas lain seperti Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan lain-lain.²⁰

K.H. Warson memiliki peran yang signifikan dalam penumpasan PKI di Yogyakarta. Sebagai Ketua Gemuis,²¹ K.H. Warson menggunakan banyak cara dalam menumpas PKI di Yogyakarta. Adapun salah satu caranya adalah K.H. Warson mengadakan Apel Akbar pada 20 Oktober 1965 di Alun-alun Utara Yogyakarta. Apel ini dihadiri oleh NU, Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Katolik. Kegiatan tersebut mendapat ijin langsung dari Komandan Komando Kota Kepolisian Yogyakarta.²² K.H. Warson bersama aktivis Gemuis lainnya juga melakukan demonstrasi turun ke jalan menuntut pembubaran PKI.

Pada tahun 1970, K.H. Warson menikah dengan Nyai Hj. Khusnul Khatimah dari Purworejo. Dari pernikahannya dikaruniai dua anak, yaitu M. Fairuz dan Qarry Aina.²³ Ia memiliki perhatian besar terhadap pendidikan kedua anaknya. M. Fairuz menyelesaikan hafalan al-Qur'an dalam waktu tujuh bulan dan putri bungsunya Qorry Aina menghafalkan al-Quran dengan mendengarkan rekaman ayat al-Quran selama dua tahun. Kemudian kedua anaknya inilah yang mengembangkan pendidikan *tahfidh al-Qur'an* di Komplek Q.

¹⁵ Nisa and Amirotulhaq;, *Jejak Sang Pionir Kamus Al Munawwir K.H.A. Warson Munawwir*, hlm. 30.

¹⁶ Nisa and Amirotulhaq;, hlm. 35.

¹⁷ Nisa and Amirotulhaq;, hlm. 43-44.

¹⁸ *Duta Masyarakat* merupakan koran milik Partai Nahdlatul Ulama. Koran ini digagas oleh K.H. Ahmad Wahid Hasyim setelah NU keluar dari Masyumi. Pada awalnya Duta Masyarakat diterbitkan untuk kepentingan menyebarkan gagasan dan aspirasi partai menjelang Pemilu 1955. Duta Masyarakat diluncurkan pertama kali tanggal 2 Januari 1954. Lihat Hairus Salim, "Duta Masyarakat," NU Online, September 29, 2012, <https://www.nu.or.id/nasional/duta-masyarakat-Uujtx> diakses 3 April 2019 pukul 14.15 WIB.

¹⁹ IPNU merupakan bagian dari badan otonom (banom) NU yang menaungi remaja dan pelajar. IPNU didirikan pada tahun 1954.

²⁰ Iskandar, Wawancara dengan Iskandar di Universitas Teknologi Yogyakarta, Komunikasi Pribadi, March 16, 2019.

²¹ Gemuis merupakan gerakan kepemudaan berbasis Islam yang beranggotakan beberapa ormas seperti GP-Ansor, Angkatan Muda Muhammadiyah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).

²² Arsip Surat Ijin Pelaksanaan Apel Akbar di Alun-alun Utara dari Komando Komandan Kota Kepolisian Yogyakarta

²³ Nisa and Amirotulhaq;, *Jejak Sang Pionir Kamus Al Munawwir K.H.A. Warson Munawwir*, hlm. 53.

K.H. Warson mulai merintis pendirian Komplek Q pada tanggal 22 September 1989. Komplek Q termasuk bagian dari Pondok Al-Munawwir Krapyak dan terletak 250 m dari kompleks Al-Munawwir pusat. Sebagai Pengasuh Komplek Q, K.H. Warson dikenal sangat demokratis dalam memimpin. Ia juga merupakan sosok yang egaliter. Kedekatan K.H. Warson dengan para santri terjalin melalui interaksi formal dan informal. Ia selalu menjaga silaturahmi dan tetap membangun interaksi yang intensif dengan alumni.

Pada tahun 2013 K.H. Warson wafat, tepatnya pada hari Kamis 8 Jumadil Akhir 1434 H/18 April 2013 setelah mengalami keram pada jantungnya. K.H. Warson wafat dalam usia 79, ribuan pelayat datang untuk memberikan penghormatan, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Salat jenazah dipimpin oleh K.H. Zainal (kakak K.H. Warson) dan dimakamkan di belakang Masjid Pathok Negara Dongkelan yang merupakan makam keluarga besar Al-Munawwir.²⁴

Asal-usul K.H.A Warson Munawwir Terjun ke Politik

Menjelang akhir kekuasaannya, Soekarno semakin cenderung memimpin dengan otoriter. Selain melarang Masyumi pada tahun 1960, Soekarno juga banyak memberikan kesempatan PKI untuk berkembang.²⁵ Pada tahun 1965, PKI mencoba melakukan kudeta yang berakibat pada timbulnya krisis politik dan propaganda di antara masyarakat termasuk di Yogyakarta. Beberapa tokoh dan aktivis di Yogyakarta juga mendapat teror dan ancaman pembunuhan dari PKI.²⁶

K.H. Warson sebagai Ketua GP Ansor ikut terlibat dalam penumpasan PKI. K.H. Warson secara resmi dan simbolik menyerahkan Banser kepada Angkatan Darat untuk membantu upaya pembubaran PKI. Peristiwa penyerahan Banser tersebut dilakukan dalam upacara militer di Alun-alun Utara Yogyakarta.²⁷

K.H. Warson masuk ke politik praktis bukanlah keputusan yang dibuat secara tiba-tiba. K.H. Warson memang telah memiliki banyak pengalaman melalui organisasi yang telah digelutinya sejak muda. Keterlibatan K.H. Warson baik sebagai ketua GP Ansor maupun ketua Gemuis dalam penumpasan PKI di tahun 1965 menandakan bahwa K.H. Warson telah dekat dengan dunia politik sejak muda. Realitas tersebut memberikan dorongan bagi K.H. Warson mengikuti secara aktif dalam politik praktis.

Pada tahun 1966 Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan dan menandai lahirnya Orde Baru. Saat itu para pemimpin Islam berfikir bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan baik untuk memainkan peran politik untuk mencapai cita-cita Islam. Hal ini mengingat Orde Baru telah mendapat dukungan penuh yang telah diberikan umat Islam. Memang pada awal Orde Baru, sempat muncul romantisme politik Islam, yang ditandai dengan peserta pemilu terdiri dari sembilan partai politik (yakni: NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Parta Murba, IPKI, PNI, dan

²⁴ K Khotimah, Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah di kediamannya Pondok Al- Munawwir Komplek Q, Komunikasi Pribadi, January 20, 2019.

²⁵ Muhammad Rusli Karim, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 25.

²⁶ T Abdurrahman, Wawancara dengan Thaha Abdurrahman di kediamannya, Depok, Komunikasi Pribadi, Agustus 2019.

²⁷ K Khotimah, Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah di kediamannya Pondok Al- Munawwir Komplek Q, Komunikasi Pribadi, January 27, 2019.

ditambah Golkar). Akan tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan, Pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan fusi partai dari sembilan partai peserta pemilu 1971 menjadi tiga partai politik: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fusi dari empat partai Islam, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari partai nasionalis, Kristen, dan Katolik, Golkar sendiri sebagai transformasi dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Dengan demikian sejak tahun 1977 hingga tahun 1997 peserta pemilu adalah tiga parpol, yakni PPP, PDI, dan Golkar.

PPP berhasil dibentuk pada 5 Januari 1973. K.H. Warson yang saat itu merupakan pengurus wilayah NU menjadikan anggotanya sebagai kader PPP. Kader dari unsur-unsur PPP secara otomatis diakui sebagai kader PPP.²⁸ Afiliasi yang dilakukan K.H. Warson kepada PPP merupakan bentuk dukungan K.H. Warson terhadap PPP sebagai satu-satunya partai Islam saat itu. Ini merupakan upaya K.H. Warson memperjuangkan suara umat Islam dalam pemerintahan Indonesia.²⁹

Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden dan menandai lahirnya Orde Reformasi dalam sejarah Indonesia. Pasca jatuhnya Orba, banyak bermunculan partai politik baru termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB didirikan pada 23 Juli 1998 sebagai kendaraan politik bagi warga Nahdliyin. Partai ini mendapat banyak dukungan dari para kiai NU termasuk K.H. Warson Munawwir. Setelah sekian lama, NU kembali memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Inilah yang membuat K.H. Warson bergabung dengan PKB. Selama bergabung K.H. Warson berhasil menjabat sebagai Ketua Dewan Syura selama dua periode.

Setelah beberapa tahun bergabung dengan PKB, pada tahun 2006 K.H. Warson dan beberapa kiai sepuh NU memilih keluar dan mendirikan partai baru dengan nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Hal ini karena adanya perbedaan visi antara para kiai sepuh dengan K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur). Pada ideologi partai politik, PKB menginginkan partai memiliki asas terbuka, sementara para kiai menginginkan asas partai adalah Islam *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*.

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

Bentuk Kontribusi K.H.A Warson Munawwir dalam Politik Praktis Anggota DPRD DIY Fraksi PPP

Dalam politik praktis karier K.H. Warson dimulai ketika bergabung di PPP pada 1973. Kemudian pada Pemilu 1977, K.H. Warson berhasil menduduki jabatan di DPRD DIY, sebagai anggota Komisi D.³⁰ K.H. Warson lebih banyak memberikan perhatian terhadap

²⁸ A. Aziz, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 95-96.

²⁹ K Khotimah, Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah di kediamannya Pondok Al- Munawwir Komplek Q, Komunikasi Pribadi, July 16, 2019.

³⁰ "Komisi D - Bidang Kesejahteraan Masyarakat," *E-Parlemen DPRD DIY* (blog), accessed September 26, 2024, <https://www.dprd-diy.go.id/komisi-d/>.

urusan keagamaan.³¹ Sebagai perwakilan satu-satunya partai Islam saat itu, jabatan anggota DPRD merupakan kesempatan K.H. Warson berdakwah di kalangan pemerintahan. K.H. Warson bersama dengan anggota DPRD lain yang berasal dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) selalu berusaha untuk memformalkan atribut-atribut keislaman dalam lingkup pemerintahan seperti mengucapkan salam sebelum berbicara, menggunakan kalimat tahmid, kalimat salawat sebagai kalimat pembuka saat berpidato. Hal ini merupakan salah satu usaha agar Islam dapat tercermin melalui kehidupan para pemeluknya.³²

K.H. Warson mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan umat Islam dan selalu berusaha agar setiap kegiatan keagamaan tidak mendapat hambatan. Seperti saat beberapa pemeluk agama lain merasa keberatan dengan adzan subuh yang menggunakan pengeras suara. K.H. Warson berjuang melalui DPRD untuk meyakinkan dan memberi pemahaman bahwa adzan dikeraskan itu perintah agama bukan keinginan pribadi umat Islam, sehingga pemeluk agama lain bisa menerima hal tersebut.³³

Ketua Dewan Syura PKB 1999-2006

Setelah Orba runtuh, *jam'iyah* organisasi masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama (NU) mendorong agar ormas ini ikut berpartisipasi dalam kancah perpolitikan nasional melalui pendirian partai. Keinginan itu direspon oleh PBNU dengan mendirikan PKB. PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 sebagai satu-satunya wadah politik NU.³⁴

K.H. Warson adalah satu dari beberapa kiai yang memiliki peran cukup besar dalam pembentukan PKB di Yogyakarta. K.H. Warson sebagai Dewan Mustahsyar PWNU selalu diminta pendapatnya terkait pembentukan PKB di Yogyakarta. Pada saat rapat finalisasi pembentukan PKB DIY, K.H. Warson aktif memberikan masukan. K.H. Warson selalu mengingatkan agar tujuan membentuk partai itu benar-benar untuk memperjuangkan umat. K.H. Warson juga bergerak langsung ke pedesaan untuk meyakinkan massa pada PKB.³⁵

Setelah PKB DIY resmi berdiri, K.H. Warson diamanahi memegang jabatan sebagai ketua Dewan Syura periode 1998-1999.³⁶ Dalam PKB, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat penting. Dewan Syura adalah lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan politik dalam upaya

³¹ Abdurrahman, Wawancara dengan Thaha Abdurrahman di kediamannya, Depok.

³² M. A. Al Balani, Wawancara dengan Amrullah di Ruang Fraksi Persatuan Demokrat (FPD), Agustus 2019.

³³ Abdurrahman, Wawancara dengan Thaha Abdurrahman di kediamannya, Depok.

³⁴ Tsaniyatul Azizah, "Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (May 2, 2012): hlm. 401, <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1225>.

³⁵ Nasih, Wawancara dengan Nasih Ridwan di kantor Adzikra Tour and Travel, Kotabaru.

³⁶ Susunan kepengurusannya adalah K.H. Ahmad Warson Munawwir sebagai Ketua Dewan Syura dan Wakil Ketua K.H. Drs. Umar Syamsul, Sekretaris Muhammad Hasyim, SH. dengan anggota terdiri dari K.H. Nawawi Abdul Aziz, Prof. Dr. Asip F. Hadipranoto, K.H. M. Zahid Ridwan, H. M. Tamam Notosiswoyo, K.H. Rosim Al-Fatih, Lc., K.H. Drs. Muhadi Zaenuddin, Drs. H. Tamyiz Muharrom, dan Drs. Zabidi Wardini. Arsip Susunan Dewan Pengurus Wilayah PKB DIY Tahun 1998-1999.

menggapai cita-cita politik PKB.³⁷ Pada pemilihan kepengurusan wilayah selanjutnya, yakni untuk periode 2001-2006 K.H. Warson Munawwir dipilih kembali sebagai Ketua Dewan Syura.³⁸ K.H. Warson memiliki keinginan agar hal-hal yang diperjuangkan para kiai dapat tersalurkan melalui kebijakan-kebijakan partai. Peran kiai bukan hanya untuk batu loncatan memperoleh banyak suara.³⁹

Sebagai Ketua Dewan Syura PKB, K.H. Warson Munawwir selalu melakukan musyawarah dalam menentukan kebijakan partai. K.H. Warson Munawwir selalu melakukan musyawarah dengan Dewan Tanfidz dalam menentukan kebijakan partai. Salah satu contohnya adalah dalam pemilihan kandidat baik untuk calon DPR, DPRD, ketua cabang dan sebagainya selalu ada musyawarah antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz.

Dalam pemilihan kandidat K.H. Warson Munawwir selalu menekankan untuk melihat kredibilitas dan akuntabilitas dari kandidat tersebut. Kandidat harus paham tentang garis perjuangan partai yang sejalan dengan garis perjuangan NU. Para kandidat diharapkan tidak akan berpolitik hanya untuk mengejar kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Usaha ini juga ditempuh K.H. Warson dengan memberikan pemahaman dan pengertian berpolitik secara baik melalui pengajian dan juga ditempuh dengan jalan berdiskusi bersama anggota partai ke kiai-kiai.⁴⁰

K.H. Warson semaksimal mungkin untuk mencari jalan yang terbaik jika terjadi perbedaan pendapat antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Pada tahun 1999, PKB hanya memperoleh satu kursi untuk DPR RI. Padahal PKB telah mencalonkan dua kandidat untuk DPR RI yaitu Ali As'ad dan Purdi E. Candra. Ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz terkait kandidat yang akan menduduki kursi DPR RI sebagai wakil DIY. Musyawarah yang dilakukan guna membahas masalah tersebut tidak menghasilkan kata mufakat.

K.H. Warson kemudian mengusulkan K.H. Ali As'ad untuk menduduki kursi DPR RI sebagai wakil DIY. Untuk mengobati kekecewaan para pendukung Purdi E. Candra, K.H. Warson mengusulkan Purdi E. Candra untuk menduduki kursi MPR RI sebagai wakil dari DIY. Alternatif tersebut pada akhirnya diterima oleh semua pihak.⁴¹ Ini membuktikan bahwa sebagai Dewan Syura PKB, K.H. Warson mampu memberikan solusi yang tepat dan bijak dan menjembatani perbedaan pendapat di internal partai.

K.H. Warson Munawwir merupakan salah satu pengusung nama K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai calon presiden menyusul lengsernya Presiden B. J. Habibie. K.H. Warson berpendapat bahwa Gusdur menjadi alternatif tepat untuk menciptakan konsolidasi khususnya bagi kaum nahdliyin. Dalam menggalang dukungan kepada Gusdur, K.H. Warson terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan para kiai di

³⁷ Azizah, "Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta," hlm. 402.

³⁸ Susunan kepengurusan dengan K.H. Warson Munawwir sebagai Ketua Dewan Syura, K.H. Nawawi Abdul Aziz dan K.H. Salimi sebagai Wakil Ketua, H. Nuruddin Amin S.Ag sebagai sekretaris, Drs. H.M. Nasikh Ridwan sebagai wakil sekretaris dengan anggota H. Sofwan Hilmy, Drs. H.M. Umar Syamsul, K.H. Mabarun, Diyan Sugiyono Drs. H. M. Rosoel Shodieq dan Drs. Wasidjan Haris. Arsip Susunan Dewan Pengurus Wilayah PKB DIY Tahun 2001-2006.

³⁹ Nasih, Wawancara dengan Nasih Ridwan di kantor Adzikra Tour and Travel, Kotabaru.

⁴⁰ I. Fatimah, Wawancara dengan Ida Fatimah di kedimannya, Pondok Al-Munawwir Komplek R, July 21, 2019.

⁴¹ Nasih, Wawancara dengan Nasih Ridwan di kantor Adzikra Tour and Travel, Kotabaru.

Buntet, Cirebon, Langitan, dan Tuban untuk membahas cara menghantarkan Gusdur menuju kursi kepresidenan.⁴²

Seiring berjalannya waktu PKB segera menjadi kekuatan penting di Yogyakarta dengan menggusur perolehan kursi PPP. PPP yang pada pemilu sebelumnya berhasil menduduki sembilan kursi hanya mampu mendapat dua kursi. Sementara itu, PKB berhasil mendapat tujuh kursi pada pemilu pertamanya. Perolehan suara PKB ini tak terlepas dari peran K.H. Warson. Dalam kampanye pertama PKB, K.H. Warson ikut berkeliling dan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa NU harus mampu berdiri menjadi panji pemegang kendali dalam rangka menegakkan Islam *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. K.H. Warson yang memberikan komando dan mengoordinir bahwa dalam kampanye harus tetap *ngewongke*⁴³ dengan cara mengunjungi dari satu rumah ke rumah secara langsung.

Selama menjabat sebagai Ketua Dewan Syura, K.H. Warson mencoba untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam tubuh PKB. K.H. Warson selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan partai. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an seperti Surah Asy-Syûrâ ayat 38 dan Ali 'Imran ayat 159 yang menyuruh umat Islam untuk melakukan musyawarah. Selain itu, K.H. Warson juga mencoba untuk melakukan dakwah *amar ma'rûf nahî munkar*. K.H. Warson sering menyampaikan dalam pengajian-pengajian dan diskusi-diskusi bahwa politik adalah salah satu sarana atau instrumen penting untuk perjuangan umat.

Karena adanya konflik internal di PKB K.H. Warson dan beberapa kiai lainnya terpaksa nonaktif dari PKB. Kondisi tersebut kemudian membawa para kiai pada diskusi untuk mencari alternatif lain. Hasil diskusi memunculkan kesepakatan untuk mendirikan partai baru dengan nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Ketua Dewan Syura PKNU

Para kiai mulai kehilangan kendaraan politik setelah keluar dari PKB, sehingga diadakan musyawarah di Ploso, Kediri dengan menghasilkan keputusan untuk mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Pada awalnya K.H. Warson kurang setuju dengan keputusan tersebut. Menurut K.H. Warson akan sulit bagi partai baru memperoleh suara ketika lawan mereka adalah PKB yang sudah mempunyai massa, ditambah lagi dengan mengusung nama Gusdur.⁴⁴ Akan tetapi para kiai yang lain menghendaki dibentuk partai politik. Hal ini membuat K.H. Warson dengan besar hati menerima keputusan musyawarah. Ini menunjukkan bahwa K.H. Warson adalah seseorang yang sangat toleransi dan tidak memaksakan kehendaknya. K.H. Warson bahkan ikut dalam merintis berdirinya PKNU.

Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, dibentuklah tim 17 untuk menyiapkan pendirian PKNU dan sebagai deklarator bagi berdirinya PKNU. Tim 17 terdiri dari K.H. Abdullah Faqih selaku Rais/Ketua dengan anggota K.H. Ma'ruf Amin (Tenara, Banten),

⁴² Nisa and Amirotulhaq, *Jejak Sang Pionir Kamus Al Munawwir K.H.A. Warson Munawwir*, hlm. 48.

⁴³ *Ngewongke* berasal dari bahasa Jawa yang berarti memuliakan orang.

⁴⁴ Khotimah, Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah di kediamannya Pondok Al- Munawwir Komplek Q, July 16, 2019.

K.H. Abdurrochman Chudlori (Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah), K.H. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin (Panji, Situbondo, Jawa Timur), K.H. M. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri, Jawa Timur), K.H. Ahmad Warson Munawwir (Krapyak, DIY), K.H. Muhaimin Gunardo (Parakan, Temanggung, Jawa Tengah), K.H. Sholeh Qosim (Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur), K.H. Nurul Huda Djazuli (Ploso, Kediri, Jawa Timur), K.H. Chasbullah Badawi (Cilacap, Jawa Tengah), K.H. Abdul Adzim Abdullah Schal (Bangkalan, Jawa Timur), K.H. Abdul Adzim Abdullah Suhaimi (Mampang Prapatan, DKI Jakarta), K.H. Mas Muhammad Subadar (Besuk, Pasuruan, Jawa Timur), K.H. A. Humaidi Dakhlan (Banjarmasin, Kalimantan Selatan), K.H. M. Thahir Syarkawi (Pinrang, Sulawesi Selatan), Habib Hamid bin Hud Al-Atthos (Cililitan, DKI Jakarta), dan K.H. Aniq Muhammadun (Pati, Jawa Tengah).⁴⁵

K.H. Warson selalu berupaya agar visi dan misi partai dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai usaha riilnya adalah selalu berusaha menegakkan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* sebagai asas partai dan artikulasi politik ulama yang selalu dijunjung tinggi. K.H. Warson lebih banyak berperan sebagai penghantar bagi pendirian dan tegaknya PKNU. Beberapa saat setelah pembentukannya K.H. Warson memilih untuk tidak lagi aktif dalam partai ini. Format politik kiai dalam PKNU adalah partai politik dan para politisi mengikuti bimbingan dan arahan para kiai yang diakui secara luas integritas moral dan kedalaman ilmunya di masyarakat luas. Namun aspirasi para ulama tetap tak terakomodasi dalam pengambilan keputusan dalam partai tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan K.H. Warson memilih mundur dari PKNU pada tahun 2009.⁴⁶

KESIMPULAN

Pada periode akhir Orde Lama dan Orde Baru terjadi usaha-usaha memarjinalkan dan menekan aktifitas politik umat Islam. Pemerintah dalam mengambil kebijakan menunjukkan adanya usaha meminggirkan umat Islam. Kedudukan umat Islam dalam perpolitikan di Indonesia tergusur. Kondisi ini mendorong K.H. Warson untuk aktif dalam politik praktis. Keterlibatan K.H. Warson dalam kancah perpolitikan bukanlah keputusan yang diambil secara instan. Keputusan ini berdasar pada pemikiran yang matang dan pengalaman yang didapat dari organisasi yang telah digelutinya sejak muda.

K.H. Warson terjun dalam politik praktis dengan tujuan agar aspirasi umat Islam tersalurkan dengan baik dan juga untuk menegakkan Islam *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Keberadaannya di DPRD DI Yogyakarta dimaknai oleh K.H. Warson sebagai peluang dan kesempatan untuk berdakwah. K.H. Warson mewarnai pemerintahan dengan nuansa Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan sangat diperhatikan, termasuk peribadatan umat Islam jangan sampai mendapatkan hambatan.

K.H. Warson berperan penting dalam pendirian PKB di DI Yogyakarta. Posisinya yang strategis, Ketua Dewan Syuro PKB, K.H. Warson mementingkan musyawarah memutuskan sesuatu. Di samping itu K.H. Warson berpikiran bahwa politik merupakan

⁴⁵ Nurudin, "Konversi Kiai Nahdlatul Ulama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) (Studi Kasus di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009)" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 54-55.

⁴⁶ Nasih, Wawancara dengan Nasih Ridwan di kantor Adzikra Tour and Travel, Kotabaru.

salah satu sarana dalam memperjuangkan hak dan kewajiban umat Islam dan bukan untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan. K.H. Warson juga termasuk salah satu tokoh deklarator pendirian PKNU. K.H. Warson berupaya untuk melaksanakan visi dan misi partai dengan baik dan juga menegakkan Islam *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang merupakan landasan partai politik bagi ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, T. Wawancara dengan Thaha Abdurrahman di kediamannya, Depok. Komunikasi Pribadi, Agustus 2019.
- Al Balani, M. A. Wawancara dengan Amrullah di Ruang Fraksi Persatuan Demokrat (FPD), Agustus 2019.
- Al-Hamdi, R. *Partai Politik Islam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Athoillah, A. *K.H. Ali Maksum, Ulama, Pesantren, Dan NU*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Aziz, A. *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Azizah, Tsaniyatul. "KUASA KIAI DALAM PEMAKNAAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (May 2, 2012). <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1225>.
- e-Parlemen DPRD DIY. "Komisi D - Bidang Kesejahteraan Masyarakat." Accessed September 26, 2024. <https://www.dprd-diy.go.id/komisi-d/>.
- Fatimah, I. Wawancara dengan Ida Fatimah di kediamannya, Pondok Al-Munawwir Komplek R, July 21, 2019.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan perubahan sosial*. Translated by Abdurrahman Wahid. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987.
- Iskandar. Wawancara dengan Iskandar di Universitas Teknologi Yogyakarta. Komunikasi Pribadi, March 16, 2019.
- Karim, Muhammad Rusli. *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Khotimah, K. Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah di kediamannya Pondok Al- Munawwir Komplek Q. Komunikasi Pribadi, January 20, 2019.
- — —. Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah di kediamannya Pondok Al- Munawwir Komplek Q. Komunikasi Pribadi, January 27, 2019.

- — —. Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah di kediamannya Pondok Al-Munawwir Komplek Q. Komunikasi Pribadi, July 16, 2019.
- Leirissa, R. Z. *PRRI, Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta Pusat: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Mustolehudin, Mustolehudin, and Siti Muawanah. "Pemikiran Pendidikan K. H. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 16, no. 1 (April 30, 2018).
- Nasih, Ridwan. Wawancara dengan Nasih Ridwan di kantor Adzikra Tour and Travel, Kotabaru. Komunikasi Pribadi, February 11, 2019.
- Nisa, Khalimatu, and Fahma Amirotulhaq; *Jejak Sang Pionir Kamus Al Munawwir K.H.A. Warson Munawwir*. Yogyakarta: PUSTAKA KOMLPEK Q, 2015.
[//lib.unwahas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D36488](http://lib.unwahas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D36488).
- Nurudin. "Konversi Kiai Nahdlatul Ulama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) (Studi Kasus di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Salim, Hairus. "Duta Masyarakat." NU Online, September 29, 2012.
<https://www.nu.or.id/nasional/duta-masyarakat-Uujtx>.
- Shokheh, Mukhamad. *Dari konfrontasi menuju akomodasi: relasi Islam-negara di Indonesia masa Orde Baru, 1966-1998*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2008.
- Suprayogo, Imam. *Kyai Dan Politik : Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Turmudi;, Dr Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS, 2004.